



Inventarisasi Barang Milik Negara dalam Mendukung Akuntabilitas dan Good Governance Pengelolaan Aset Publik di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Berliana Sesylia Putri Anarys¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: berlianasesylia@email.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 16, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted February 06, 2026

Available online February 06, 2026

Kata Kunci:

Inventarisasi Barang Milik Negara; Akuntabilitas; Good Governance; Pengelolaan Aset Publik.

Keywords:

Inactive records; Records governance; Records disposition; Human resources.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur serta perannya dalam mendukung akuntabilitas dan prinsip good governance dalam pengelolaan aset publik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan praktik inventarisasi BMN di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep akuntabilitas serta good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi BMN telah dilaksanakan secara rutin oleh Bagian Umum melalui pengecekan fisik aset dan pencocokan data administrasi. Proses inventarisasi menghasilkan data aset yang relatif tertib dan terdokumentasi, sehingga mendukung pengendalian internal serta penyusunan laporan aset dan laporan keuangan. Inventarisasi juga berperan dalam memastikan kejelasan informasi mengenai keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan aset negara. Namun demikian, pelaksanaan inventarisasi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain perubahan lokasi aset, tidak ditemukannya

label Nomor Urut Pendaftaran pada sebagian aset, keterbatasan pembaruan data, penggunaan sistem pencatatan manual, serta keterbatasan sumber daya manusia. Kendala-kendala tersebut berdampak pada keakuratan dan ketepatan waktu data inventarisasi, sehingga pemanfaatannya sebagai dasar pengambilan keputusan strategis belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inventarisasi BMN berperan penting dalam mendukung akuntabilitas dan penerapan prinsip good governance, namun masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, sistem informasi, dan partisipasi pengguna barang agar pengelolaan aset publik dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola aset negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi dalam jangka panjang dan berkesinambungan nasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of State Property (BMN) inventory at the East Java Provincial Representative Office of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and its role in supporting accountability and the principles of good governance in public asset management. This research applies a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The data obtained was analyzed by comparing BMN inventory practices in the field with the provisions of laws and regulations and the concepts of accountability and good governance. The results of the study show that BMN inventory has been carried out routinely by the General Affairs Division through physical asset checks and administrative data matching. The inventory process produces relatively orderly and documented asset data, thereby supporting internal control and the preparation of asset and financial reports.

Inventory also plays a role in ensuring clarity of information regarding the existence, condition, and utilization of state assets. However, the implementation of inventory still faces a number of obstacles, including changes in asset locations, the absence of Registration Number labels on some assets, limitations in data updates, the use of manual recording systems, and limited human resources. These obstacles have an impact on the accuracy and timeliness of inventory data, so that its use as a basis for strategic decision-making is not yet optimal. This study concludes that the inventory of BMN plays an important role in supporting accountability and the application of good governance principles, but still requires strengthening in terms of institutional aspects, information systems, and user participation so that public asset management can run effectively, transparently, and sustainably. This strengthening is expected to improve the quality of state asset management and strengthen public trust in the organization's performance in the long term and national sustainability.

1. PENDAHULUAN

Dalam era pemerintahan modern, pengelolaan aset negara menjadi salah satu elemen krusial yang berperan dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi publik serta akuntabilitas keuangan negara (Sitanggang & Setiawan, 2021). Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari kekayaan negara memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai sarana pendukung utama pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik (Aira, 2020). Namun, pengelolaan BMN yang tidak tertib berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi, ketidaksesuaian data, serta temuan audit yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan BMN meliputi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, hingga penghapusan dan pengawasan. Dalam konteks ini, inventarisasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar pencatatan aset, pengendalian internal, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah (Budisusilo, 2005; Siregar, 2004). Inventarisasi yang akurat dan terdokumentasi dengan baik mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik (Astini, 2018).

Pengelolaan BMN yang tertib serta baik dan benar harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen aset publik, yang menekankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Selain itu, penerapan prinsip pada good governance, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan terhadap peraturan, menjadi indikator utama kualitas tata kelola aset publik (Singh, 2023; UNDP, 2009). Akuntabilitas dalam pengelolaan BMN menuntut pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga inventarisasi menjadi instrumen penting untuk memastikan aset dikelola dengan benar (Siregar, 2004).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mandat strategis dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap instansi pemerintah daerah, tetapi juga bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan BMN untuk mendukung operasional kelembagaan. Oleh karena itu, praktik

inventarisasi BMN di BPKP menjadi studi yang relevan untuk mengkaji penerapan prinsip good governance dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan inventarisasi BMN di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, sejauh mana prinsip good governance diterapkan dalam pengelolaan BMN, serta kendala apa saja yang dihadapi selama proses inventarisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi prosedur inventarisasi, menilai penerapan prinsip good governance, serta mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan BMN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan inventarisasi BMN di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BMN yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan terhadap peraturan, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul selama proses inventarisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi instansi pemerintah dalam memperkuat tata kelola aset publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis proses, praktik, dan dinamika pengelolaan aset publik dalam kelembagaan, serta bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis dan rinci. Desain penelitian yang digunakan bersifat studi kasus, dengan fokus pada praktik inventarisasi BMN di satu unit organisasi. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi praktik nyata, prosedur, dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan aset, sekaligus menilai penerapan prinsip manajemen aset, akuntabilitas, dan good governance dalam praktik sehari-hari.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan dilakukannya wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa daftar inventaris BMN, *spreadsheet* aset, kartu identitas barang (KIB), laporan pengadaan dan penggunaan BMN, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan BMN, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Nomor 27 Tahun 2014.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung tentang proses inventarisasi, pencatatan, dan pengelolaan BMN. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pengelola BMN untuk memperoleh informasi mengenai penerapan prinsip good governance, kendala inventarisasi, dan strategi peningkatan akuntabilitas. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen resmi dan peraturan yang relevan. Selain itu,

pencararan lapangan dilakukan untuk menangkap dinamika, praktik, serta permasalahan yang muncul selama proses pengelolaan aset berlangsung.

Pengembangan instrumen penelitian dilakukan melalui pedoman observasi dan catatan lapangan yang disusun berdasarkan indikator praktik pengelolaan BMN serta prinsip akuntabilitas dan good governance. Instrumen ini memastikan data yang diperoleh relevan, sistematis, dan dapat dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan regulasi dan literatur terkait manajemen aset publik, akuntabilitas, serta prinsip good governance (Agyapong, 2017; Setiabudhi, 2019) untuk memastikan validitas dan keakuratan data. Tahap terakhir berupa interpretasi, yaitu menilai kesesuaian antara teori dan praktik pengelolaan aset di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, sekaligus mengidentifikasi kendala, kekuatan, dan potensi perbaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Bagian Umum sebagai unit kerja yang memiliki tanggung jawab sebagai pengelolaan dan administrasi aset. Inventarisasi mencakup berbagai jenis BMN yang digunakan untuk mendukung operasional kelembagaan, antara lain Alat Pengolah Data (APD), perabot kantor, serta sarana pendukung kerja lainnya. Keberagaman jenis aset tersebut menunjukkan kompleksitas pengelolaan BMN yang menuntut pencatatan dan pengawasan secara sistematis. Inventarisasi menjadi tahapan awal dalam memastikan aset negara tercatat, teridentifikasi, dan dapat dikendalikan. Oleh karena itu, inventarisasi memiliki peran strategis dalam keseluruhan siklus pengelolaan BMN.

Proses inventarisasi dilakukan melalui pengecekan fisik aset secara langsung pada masing-masing unit kerja. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan aset di lapangan dengan data administrasi yang tercantum dalam daftar inventaris. Setiap aset diperiksa berdasarkan identitas barang, kondisi fisik, lokasi penempatan, serta pengguna barang. Hasil pengecekan tersebut kemudian dicocokkan dengan data yang tercatat dalam spreadsheet inventaris BMN. Apabila ditemukan perbedaan, dilakukan pembaruan data untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual aset. Tahapan ini menunjukkan bahwa inventarisasi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan ulang, tetapi juga sebagai proses verifikasi data aset.

Pembaruan data inventaris dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet yang dikelola oleh pengelola BMN. Data yang diperbarui meliputi identitas aset, kondisi barang, lokasi penggunaan, serta unit kerja pengguna. Setelah proses pembaruan selesai, data tersebut disampaikan untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan kesesuaiannya dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan adanya alur pertanggungjawaban internal dalam pengelolaan BMN. Namun demikian, penggunaan sistem manual juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam efisiensi dan integrasi data aset.

Inventarisasi BMN juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan aset. Melalui inventarisasi, instansi dapat mengidentifikasi aset yang masih layak digunakan, aset yang memerlukan perbaikan, serta aset yang tidak lagi optimal secara fungsional. Informasi tersebut menjadi dasar dalam mendukung proses pengambilan keputusan mengenai pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan aset. Dengan demikian, inventarisasi berkontribusi dalam memastikan pemanfaatan aset negara secara efisien. Akan tetapi, pemanfaatan hasil inventarisasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis masih memerlukan penguatan. Hal ini terutama berkaitan dengan konsistensi penggunaan data inventaris dalam proses perencanaan kelembagaan. Berdasarkan temuan lapangan, inventarisasi BMN telah dilaksanakan secara rutin dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Prosedur tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku secara nasional. Pelaksanaan inventarisasi berjalan secara prosedural dan menghasilkan data aset yang relatif tertib serta terdokumentasi. Meskipun demikian, efektivitas inventarisasi masih sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pemanfaatan data inventaris. Inventarisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen penguatan pengendalian internal dan pengambilan keputusan strategis. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan peran inventarisasi dalam mendukung tata kelola aset publik yang lebih akuntabel.

Analisis Kendala dalam Pelaksanaan Inventarisasi BMN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi BMN di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas proses inventarisasi. Kendala teknis yang sering ditemukan antara lain perubahan lokasi aset akibat renovasi atau penataan ulang ruang kerja. Perubahan lokasi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, tidak ditemukannya label Nomor Urut Pendaftaran (NUP) pada sebagian aset menyulitkan proses identifikasi barang. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengendalian fisik aset.

Kendala administratif juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan inventarisasi. Beberapa data aset lama belum sepenuhnya diperbarui dalam daftar inventaris sehingga memerlukan proses penelusuran ulang. Proses pembaruan data yang dilakukan secara manual meningkatkan potensi keterlambatan dan kesalahan pencatatan. Selain itu, ketergantungan pada dokumen administratif yang tidak selalu mutakhir menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas data inventaris sangat bergantung pada kedisiplinan administrasi. Tanpa pembaruan data yang konsisten, inventarisasi berisiko menghasilkan informasi yang kurang akurat.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan inventarisasi BMN. Jumlah petugas yang secara khusus menangani pengelolaan BMN relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses pengecekan fisik dan pencocokan data memerlukan waktu yang lebih lama. Beban kerja yang tinggi berpotensi mempengaruhi tingkat ketelitian dalam pelaksanaan inventarisasi. Selain itu, pengelolaan BMN seringkali menjadi tugas tambahan di luar tugas utama pegawai. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fokus dalam pengelolaan aset.

Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada keakuratan dan ketepatan waktu pembaruan data aset. Data inventaris yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan aset dan laporan keuangan. Selain itu, keterlambatan pembaruan data dapat menghambat proses perencanaan kebutuhan aset. Dengan demikian, kendala inventarisasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada akuntabilitas pengelolaan aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa inventarisasi BMN memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola organisasi.

Secara keseluruhan, kendala dalam pelaksanaan inventarisasi menunjukkan bahwa keberhasilan inventarisasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal. Inventarisasi memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat agar dapat berjalan secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan inventarisasi harus dilakukan secara komprehensif. Tanpa perbaikan tersebut, inventarisasi berpotensi hanya menjadi kegiatan administratif rutin. Oleh karena itu, penguatan inventarisasi BMN menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tata kelola aset publik yang akuntabel.

Pembahasan

Inventarisasi BMN dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Aset Publik

Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan aset publik di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dan pemanfaatan aset negara. Melalui inventarisasi, instansi dapat memastikan bahwa setiap aset tercatat, teridentifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Proses pengecekan fisik dan pencocokan data administrasi menjadi dasar dalam membangun kejelasan informasi aset. Kejelasan informasi tersebut merupakan prasyarat utama dalam akuntabilitas pengelolaan aset publik.

Inventarisasi yang dilakukan secara berkala juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal. Data inventaris yang akurat memungkinkan instansi untuk mengawasi penggunaan aset dan mencegah potensi penyalahgunaan. Selain itu, inventarisasi mendukung penyusunan laporan aset dan laporan keuangan pemerintah yang andal. Keandalan laporan keuangan mencerminkan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Siregar (2004) dan Budisusilo (2005) yang menekankan pentingnya inventarisasi dalam pengelolaan aset negara. Dengan demikian, inventarisasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas publik.

Selain mendukung akuntabilitas administratif, inventarisasi juga berperan dalam membangun transparansi internal organisasi. Data inventaris yang tertib memungkinkan pimpinan untuk memantau penggunaan aset secara lebih efektif. Transparansi internal tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, inventarisasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan antarunit kerja. Kepercayaan ini penting dalam menciptakan tata kelola organisasi yang sehat. Dengan demikian, inventarisasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada budaya organisasi.

Meskipun demikian, kontribusi inventarisasi dalam mendukung akuntabilitas masih memerlukan penguatan. Inventarisasi cenderung lebih difokuskan pada pemenuhan kewajiban pencatatan dibandingkan dengan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis. Akuntabilitas yang terwujud masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya strategis. Oleh karena itu, inventarisasi perlu dikembangkan sebagai alat manajerial yang mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Dengan penguatan tersebut, inventarisasi dapat berperan lebih optimal dalam sistem akuntabilitas publik.

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan BMN

Akuntabilitas yang dibangun melalui inventarisasi BMN menjadi fondasi utama dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset publik. Good governance menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan patuh terhadap hukum. Inventarisasi BMN berkontribusi langsung dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut melalui penyediaan data aset yang tertib dan terdokumentasi. Dengan demikian, inventarisasi menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola aset publik. Peran ini semakin relevan dalam konteks pengelolaan aset negara yang kompleks.

Prinsip transparansi tercermin dari tersedianya data inventaris yang dapat diakses oleh pihak internal yang berkepentingan. Data inventaris menjadi dasar dalam pengawasan dan pengendalian internal. Transparansi data aset memungkinkan pimpinan dan unit kerja untuk memantau penggunaan aset secara objektif. Selain itu, transparansi juga berkontribusi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset. Namun, transparansi tersebut masih bersifat internal dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan BMN masih dapat ditingkatkan.

Prinsip partisipasi terlihat dari keterlibatan pengguna barang dalam proses inventarisasi. Pengguna barang berperan dalam memberikan informasi mengenai kondisi dan keberadaan aset. Namun, tingkat partisipasi tersebut masih bervariasi antarunit kerja. Perbedaan tingkat partisipasi mencerminkan perbedaan pemahaman dan kepedulian terhadap pengelolaan aset. Partisipasi yang belum merata berpotensi menghambat efektivitas inventarisasi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan komitmen pengguna barang menjadi aspek penting dalam mewujudkan good governance.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan prinsip penting dalam good governance pengelolaan BMN. Pelaksanaan inventarisasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Kepatuhan ini menunjukkan adanya upaya menjalankan pengelolaan BMN sesuai kerangka hukum yang berlaku. Namun, kepatuhan formal perlu diiringi dengan pemahaman substantif terhadap tujuan regulasi. Tanpa pemahaman tersebut, kepatuhan berisiko menjadi formalitas semata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep good governance yang dikemukakan oleh UNDP (2009) dalam Singh & Nagar (2023), yang menekankan bahwa tata kelola publik yang baik tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada praktik dan komitmen aktor organisasi. Inventarisasi BMN merupakan salah

satu praktik konkret dalam mewujudkan prinsip good governance. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, good governance pengelolaan BMN memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Secara keseluruhan, inventarisasi BMN berperan strategis dalam mendukung penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset publik. Inventarisasi tidak hanya mendukung akuntabilitas, tetapi juga memperkuat transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum. Meskipun demikian, peran tersebut masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara optimal. Penguatan sumber daya manusia, sistem informasi, dan koordinasi internal menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola aset. Dengan penguatan tersebut, inventarisasi BMN dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan good governance pengelolaan aset publik secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan secara rutin dan mengacu pada ketentuan serta prosedur pengelolaan BMN yang berlaku. Inventarisasi dilaksanakan oleh Bagian Umum sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset melalui kegiatan pengecekan fisik aset dan pencocokan dengan data administrasi. Proses tersebut secara umum mampu menghasilkan data aset yang tertib, terdokumentasi, serta mencerminkan kondisi aktual BMN yang digunakan dalam mendukung operasional kelembagaan.

Inventarisasi BMN berperan penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan aset publik, khususnya dalam memastikan kejelasan informasi mengenai keberadaan, kondisi, lokasi, dan pemanfaatan aset negara. Melalui inventarisasi, instansi memiliki dasar yang jelas dalam penyusunan laporan aset dan laporan keuangan serta sebagai instrumen pengendalian internal terhadap penggunaan BMN. Selain itu, inventarisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi internal dan ketertiban administrasi aset. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan inventarisasi masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan kelembagaan, seperti keterbatasan sistem pencatatan, pembaruan data, dan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan data inventaris belum sepenuhnya optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan penguatan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan aset publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat pelaksanaan inventarisasi BMN dengan meningkatkan pemanfaatan data inventaris sebagai instrumen manajerial dalam perencanaan, pemeliharaan, dan pengendalian aset negara. Selain itu, penguatan sistem informasi inventaris yang terintegrasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola BMN perlu dilakukan guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu pembaruan data aset.

Selanjutnya, disarankan kepada pengelola dan pengguna barang di seluruh unit kerja agar meningkatkan partisipasi dan komitmen dalam proses inventarisasi BMN. Keterlibatan aktif seluruh pihak diharapkan dapat menjamin keakuratan data inventaris serta mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam pengelolaan aset publik. Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai pemanfaatan sistem digital dalam inventarisasi BMN dapat dikembangkan untuk memperkaya rekomendasi kebijakan pengelolaan aset negara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agyapong, K. E. (2017). *Internal Control Activities as a Tool for Financial Management in the Public Sector: A Case Study of Ghana Post Company Limited*. <https://doi.org/10.32873/unl.dc.jade6.1.3>
- Aira, A. (2004). *Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah*. 21–39.
- Astini, Y. (2018). Kualitas Aparatur, Sistem Informasi Dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 173. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/40048>
- Budisusilo, S. &. (2005). *Penilaian dan Pengelolaan Aset*.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Singh, A., & Nagar, V. (2023). Peer-Reviewed, Multidisciplinary & Multilingual Journal A THEORETICAL UNDERSTANDING OF GOVERNANCE AND GOOD GOVERNANCE. *A Journal of Gujarat University*, 2(1), 39–47. <http://vidyajournal.org>
- Siregar, D. D. (2004). *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sitanggang, N. M., & Setiawan, D. (2021). *Analysis of the Implementation of Asset Management in the Management of State Booty*. 145, 15349–15360.